

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN BUMN**

Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Antonius Eko Haryono

012114244

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

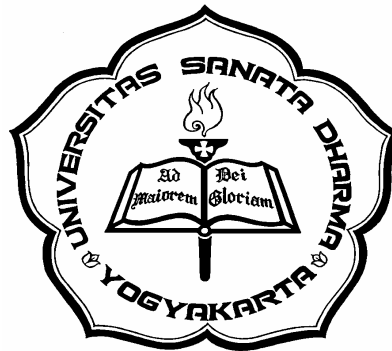
2007

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN BUMN**

Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Antonius Eko Haryono

012114244

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2007

SKRIPSI
**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN BUMN**

Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat

Oleh:

Antonius Eko Haryono

012114244

Telah Disetujui oleh:



Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

tanggal 25 Juni 2007

Pembimbing II

Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.

tanggal 27 Juli 2007

SKRIPSI
**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN BUMN**
Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Antonius Eko Haryono

012114244

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Oktober 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YEM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.
Anggota	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Oktober 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

Motto dan Persembahan

Tidak ada yang **ABADI** didunia ini
selain **PERUBAHAN...**

(Sokrates)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✘ Jesus Kristus.
- ✘ Bapak & Ibunda tercinta.
- ✘ Adikku Yulius Dwi Haryanto & Stevanus Hari Trihartanto.
- ✘ Om Pater Yohanes Kusno Bintoro, CM
- ✘ Semua orang yang telah mendidik dan membimbingku hingga saat ini.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan BUMN dan dimajukan untuk diuji
pada tanggal 23 Oktober 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2007
Yang membuat pernyataan,

Antonius Eko Haryono

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan, sebab atas kasih dan anugrah-Nya yang berlimpah, skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Walau sering tak mudah dan dalam proses penyusunannya terkadang harus menemukan kesulitan, namun penulis tetap menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan yang menggembirakan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini takkan pernah tercipta. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt. Selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. E. Maryarsanto P., S.E., Akt. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda FX. Maryono dan Ibunda FY. Suhartini, yang telah mendukungku dengan doa dan pengorbanan yang besar untuk membuat aku seperti ini, hanya ucapan terima kasih yang bisa kuucapkan. Aku tak tau bagaimana aku harus membalasnya.
6. Adikku Stevanus Hari Trihartanto dan Yulius Dwi Haryanto. Trimakasih atas segala support dan doanya.
7. Pater Paulus Yoyo Yoakhim, OSC, Pater Yohanes Kusno Bintoro, CM, Pater Stephanus Rudi Sulistijo, CM dan Bruder Martinus Suparmin, CSA terima kasih atas bimbingan, nasihat dan doanya. Selamat berkarya...
8. Pak Slamet Wahyono dan keluarga, terima kasih atas bantuan, nasihat serta supportnya selama ini.
9. Mas Andri Sewoko, matur nuwun atas support dan bantuannya hingga aku bisa mendapatkan semuanya.
10. Ir. Djendam Gurusinga, Dipl. HE., selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta II yang memberikan izin untuk penelitian. Segenap karyawan Perum Jasa Tirta II yang telah banyak membantu dengan mencarikan data yang dibutuhkan.
11. Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran tempatku berkeluh kesah, terimakasih telah membuatku bahagia dari kepenatan hidup ini.
12. Teman-teman Akuntansi 2001. Terima kasih atas persahabatannya, semoga tetap kompak selalu. *Let's go to the adventure..*
13. Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PERMATA).
14. Keluarga Bapak & Ibu kost Saren 68 Yogyakarta.

15. Prima SOBODA yang selalu setia mengantarkan perjalanan indah bagiku. *Commitment to Excellence.*
16. *The Macz Man*, Garda Purwa, Persikmania, Jackmania, Viking, Slemania, Brajamusti, LA Mania, *The Lobster*, Aremania, Bonek, Panser Biru, dan seluruh pencinta sepak bola ditanah air. *No anarki, no tawuran, just good football Indonesia.* Bravo Sepak bola Nasional.
17. Yogyakarta yang telah memberi banyak kenangan bagiku, *thanks* buat keindahannya.
18. Semua orang yang telah membangkitkan semangatku dari keterpurukan. Trimakasih atas segala support dan doanya.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2007



Antonius Eko Haryono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan Skripsi	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Pengertian Laporan Keuangan.....	6
B. Tujuan Laporan Keuangan.....	6
C. Unsur-unsur Laporan Keuangan	7
D. Pemakai dan Kebutuhan Informasi	8
E. Badan Usaha Milik Negara	10
F. Analisis laporan Keuangan	11
G. Kinerja Keuangan	12
H. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan SK. Menteri BUMN No. Kep 100/MBU/2002.....	13
I. Review Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
C. Subyek dan Obyek Penelitian	18
D. Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	31
A. Latar Belakang Perusahaan.....	31
B. Filosofi Perusahaan.....	33
C. Strategi Perusahaan.....	36
D. Pelayanan Umum	38
E. Lokasi Perusahaan	40
F. Struktur Organisasi	41
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43

A. Menghitung Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan.....	43
B. Perhitungan Masing-masing Indikator.....	56
BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Keterbatasan.....	59
C. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I : Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II.....	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Indikator Serta Bobot Infrastruktur.....	19
Tabel 2 Daftar Skor Penilaian ROE.....	21
Tabel 3 Daftar Skor Penilaian ROI.....	22
Tabel 4 Daftar Skor Penilaian <i>Cash Ratio</i>	23
Tabel 5 Daftar Skor Penilaian <i>Current Ratio</i>	24
Tabel 6 Daftar Skor Penilaian <i>Collection Periods</i>	25
Tabel 7 Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan	26
Tabel 8 Daftar Skor Penilaian TATO	27
Tabel 9 Daftar Skor Penilaian TMS thd TA	28
Tabel 10 Penilaian ROE.....	43
Tabel 11 Penilaian ROI.....	45
Tabel 12 Penilaian <i>Cash Ratio</i>	47
Tabel 13 Penilaian <i>Current Ratio</i>	48
Tabel 14 Penilaian <i>Collection Periods</i>	50
Tabel 15 Penilaian Perputaran Persediaan.....	51
Tabel 16 Penilaian TATO	53
Tabel 17 Penilaian TMS thd TA.....	55
Tabel 18 Hasil Perhitungan Masing-masing Indikator	56
Tabel 19 Rincian Bobot Keuangan	56
Tabel 20 Tingkat Kesehatan Keuangan	58

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN

Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat

Antonius Eko Haryono

012114244

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan Perum Jasa Tirta II tahun 2001-2004.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, khusus pada aspek keuangannya saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 dapat disimpulkan bahwa: Perum Jasa Tirta II pada tahun 2001 memperoleh total skor 43,75 dengan predikat AA. Pada tahun 2002 memperoleh total skor 45,75 dengan predikat AA, tahun 2003 memperoleh total skor 26,5, menunjukkan kondisi kurang sehat dengan predikat BBB, sedangkan pada tahun 2004 memperoleh total skor 40,75 menunjukkan kondisi yang sehat dengan predikat AA.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF FINANCIAL HEALTH LEVEL OF STATE-OWNED ENTERPRISE (BUMN) A Case Study at Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta West Java

**Antonius Eko Haryono
012114244
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007**

The aim of this study was to find out the financial health level of Perum Jasa Tirta II for the period of 2001-2004.

This study was a case study. This study obtained the data by interviewing and documentation. The data analysis technique used was the Minister of State-Owned Corporations Decision Letter No. KEP-100/MBU/2002, especially on financial aspect.

The result showed that based on the Minister of State-Owned Corporations Decision Letter No. KEP-100/MBU/2002 it could be concluded that: Perum Jasa Tirta II on 2001 got a total score of 43,75 with AA predicate. On year 2002, it got a total score of 45,75 with AA predicate. On 2003 it got a total score of 26,5 showing a less healthy condition with BBB predicate, where as on 2004 it got a total score of 40,75 showing a healthy condition with AA predicate.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu bangsa salah satunya tidak lepas dari peran berbagai perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan kemajuan perekonomian bangsa tersebut, perkembangan perusahaan juga semakin cepat, namun tidak sedikit juga berbagai perusahaan yang gulung tikar/bangkrut, karena tidak dapat lagi menjalankan usahanya yang disebabkan oleh krisis yang berkepanjangan. Cepatnya perkembangan perusahaan tersebut, semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang serius seperti masyarakat dan pemerintah.

Kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan dipengaruhi oleh kondisi masing-masing perusahaan. Perusahaan yang sehat akan mampu bersaing dengan perusahaan lain, sedangkan perusahaan yang kondisinya tidak sehat akan kalah dalam persaingan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan rugi laba.

Setiap perusahaan, baik perusahaan swasta atau perusahaan BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang baik, sebagai peranan dalam mewujudkan pembangunan. Pencapaian hasil kinerja yang maksimal dapat dilihat melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diharapkan mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Salah satu alat yang

digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi keadaan keuangan pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan dimasa yang akan datang berdasarkan rasio keuangannya.

Hasil analisis rasio keuangan akan menjelaskan dan memberi gambaran tentang kondisi perusahaan serta mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan jika dilihat dari rasio keuangannya. Analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern antara pemilik saham dan manajemen perusahaan saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan. Meskipun kepentingan berbagai pihak tersebut berbeda, tetapi mereka mengharapkan memperoleh informasi yang diperoleh dari hasil analisis laporan keuangan perusahaan.

Di Indonesia peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tidak lagi sebatas pada pengelolaan sumber daya produksi barang tetapi juga melayani kegiatan pelayanan jasa bagi hajat hidup orang banyak. Menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin terbuka, maka penilaian tingkat kesehatan BUMN sangat penting untuk dilakukan dengan baik. Penilaian tingkat kesehatan BUMN dapat diukur dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN. Keputusan tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN dapat menjalankan kegiatannya secara lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesehatan Perum Jasa Tirta II tahun 2001-2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 ditinjau dari aspek keuangannya saja.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan Perum Jasa Tirta II tahun 2001-2004 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dan memberi gambaran kepada perusahaan tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan BUMN dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan bahan masukan dengan melakukan pertimbangan perbaikan dan perencanaan untuk kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma serta bahan acuan untuk penelitian atau penulisan skripsi yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perusahaan BUMN.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memperluas pengetahuan tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan BUMN dengan cara mempertemukan antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya di perusahaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dalam penelitian ini diperoleh susunan dan bahasan yang sistematis, maka penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum pada setiap bab yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori yang mendukung dalam menganalisa tingkat kesehatan keuangan perusahaan BUMN yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, serta teknik analisa data yang dilakukan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan secara umum yaitu PERUM JASA TIRTA II yang meliputi latar belakang, visi dan misi serta strategi perusahaan.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisa data dan pembahasan masalah yang akan diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan masalah dan saran dalam penelitian.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan (*finansial*) suatu perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, atau bagian dari proses laporan yang lengkap yang terdiri dari neraca dan laba rugi. (Prastowo, 2002: 16)

B. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan sebagai berikut (Prastowo, 2002: 5-6):

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.
- 3) Informasi kinerja perusahaan, yang diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa yang akan datang, serta memprediksikan kapasitas perusahaan dalam beroperasi

serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

C. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut karakteristik ekonomi, laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar, antara lain (Prastowo, 2002: 8-11):

1) Unsur Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan langsung dengan posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas (yang disajikan pada laporan keuangan yang disebut neraca). Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa depan. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

2) Unsur Kinerja Perusahaan

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan adalah penghasilan dan beban. Unsur kinerja perusahaan ini disajikan dalam laporan laba rugi. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi (setoran) penanaman modal. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam

bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

D. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan meliputi para manajer, investor dan calon investor, kreditur, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. (IAI, 2004: 2-3)

1. Manajer

Manajer/pimpinan perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan, sehingga dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai baik di masa lalu maupun di masa sekarang.

2. Para Investor dan Calon Investor

Para Investor dan calon investor berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya. Karena biasanya para investor memusatkan perhatiannya pada analisis profitabilitas perusahaan.

3. Kreditur

Kreditur tertarik dengan informasi keuangan, sehingga memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama bila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

5. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan informasi keuangan untuk mengetahui alokasi sumber daya yang ada, karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan pendapatan lain.

6. Karyawan

Karyawan tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberi balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja, serta kesejahteraan keluarga.

7. Masyarakat

Masyarakat membutuhkan laporan keuangan karena dapat menyediakan informasi perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

E. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut pasal 1 ayat 1 dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri. BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. BUMN Infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi:

- a. Pembangunan, transmisi atau pendistribusian listrik.
- b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara, atau kereta api.
- c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
- d. Bendungan dan irigasi.

Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1)

dalam SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, ditetapkan oleh Menteri BUMN.

F. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang menganalisis laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik karena didukung oleh informasi keuangan yang baik dan lengkap. Munawir (2002: 35) mengemukakan arti analisis laporan keuangan sebagai penelaah atau mempelajari hubungan-hubungan dan kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Inti yang ingin diungkapkan adalah mengetahui kondisi dan prestasi perusahaan yang telah dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu.

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan.

Tujuan perusahaan mengadakan analisis terhadap laporan keuangan, adalah sebagai berikut (Simangunsong, 1995: 2-3):

- a. Untuk mengetahui kondisi keuangan pada saat tertentu. Hal ini dapat dilihat dari neraca yang menggambarkan jumlah harta, hutang, dan modal suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

- b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dicapai perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi yang menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba-rugi perusahaan.
- c. Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Tujuan ini dapat dicapai dengan membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan untuk 2 periode atau lebih yang berbeda, baik neraca maupun laporan laba rugi.

G. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja

Kinerja mengandung pengertian kemampuan kerja untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif. Dalam suatu badan usaha, tinggi rendahnya kinerja diukur dalam bentuk laba yang dihasilkan.

Berdasarkan IAI (2004: 5), pengertian kinerja adalah:

”Info Kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Info fluktuasi kinerja adalah penting dalam hal ini. Info kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu info tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya”.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi penilaian kinerja merupakan bagian dari proses

pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja yang dilakukan dengan cara menetapkan standar tertentu.

H. Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002.

Metode analisis yang digunakan untuk menilai kinerja BUMN adalah dengan menggunakan rasio keuangan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. Pada SK Menteri BUMN, untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan digolongkan menjadi sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Untuk menentukan tingkat kesehatan tersebut ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi, dimana total skor secara keseluruhan gabungan ketiga aspek ini sama dengan 100 (TS=100). Berdasarkan kriteria SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, penilaian kinerja berpedoman pada besarnya bobot yang diperoleh perusahaan.

1. Sehat, yang terdiri dari:

AAA apabila : $TS > 95$

AA apabila : $80 < TS \leq 95$

A apabila : $65 < TS \leq 80$

2. Kurang Sehat, yang terdiri dari:

BBB apabila : $50 < TS \leq 65$

BB apabila : $40 < TS \leq 50$

B apabila : $30 < TS \leq 40$

3. Tidak Sehat, yang terdiri dari:

CCC apabila : $20 < TS \leq 30$

CC apabila : $10 < TS \leq 20$

C apabila : $TS \leq 10$

Ket. TS = Total Skor

Penilaian kinerja perusahaan dinilai dari tiga aspek yaitu aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Dalam penelitian ini hanya mengukur berdasarkan aspek keuangan, maka aspek operasional dan aspek administrasi tidak diteliti dalam penentuan skor tingkat kesehatan BUMN. Untuk mengetahui berapa besar proporsi sumbangan dari ketiga aspek di atas terhadap total skor keseluruhan (100), kita dapat menganalisisnya dengan beberapa indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja aspek keuangan perusahaan yang terdiri dari:

1. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)
2. Imbalan Investasi (ROI)
3. Rasio Kas
4. Rasio Lancar
5. *Collection Periods*
6. Perputaran Persediaan

7. Perputaran Total Asset
8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

I. Review Penelitian

Hapsari (2005) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.198/KMK.016/1998 Studi Kasus pada perusahaan farmasi yaitu PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Indo Farma, Tbk tahun 2000-2002. Peneliti merumuskan masalah, bagaimana tingkat kesehatan keuangan PT. Kimia Farma dan PT. Indo Farma dari tahun 2000-2002 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.198/KMK.016/1998 khususnya pada aspek keuangan yang meliputi 8 indikator yaitu:

1. Imbalan Kepada Pemegang Saham/*Return On Equity (ROE)*
2. Imbalan Investasi/*Return On Investment. (ROI)*
3. Rasio Kas/*Cash Ratio.*
4. Rasio Lancar/*Current Ratio.*
5. *Collection Periods.*
6. Perputaran Persediaan.
7. Perputaran Total Aset/*Total Asset Turn Over (TATO)*
8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (RMS terhadap TA)

Peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.198/KMK.016/1998 dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dari Bursa Efek Jakarta (BEJ). Peneliti

menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk lebih baik dibanding PT. Indo Farma, Tbk.

Asmara (2006) dengan judul skripsi Analisis Tingkat Kesehatan Finansial Perusahaan BUMN Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, Studi Komparatif PT. Indo Farma dan PT. Kimia Farma. Peneliti merumuskan masalah, bagaimana tingkat kesehatan finansial perusahaan BUMN Non Infrastruktur pada PT. Indo Farma dan PT. Kimia Farma ditinjau dari aspek keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dari Bursa Efek Jakarta (BEJ). Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk lebih baik dibanding PT. Indo Farma, Tbk.

Terdapat persamaan pada kedua skripsi tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta teknik analisis data yang dilakukan. Meskipun pada skripsi Hapsari menggunakan Surat Keputusan Menteri yang lama (tahun 1998), tetapi isi dari Surat Keputusan Menteri tersebut sama. Hanya saja Surat Keputusan Menteri yang lama sudah tidak digunakan lagi. Perbedaan antara kedua skripsi tersebut dengan penelitian saya yaitu tempat penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada perusahaan BUMN Infrastruktur. Alasan saya memilih perusahaan BUMN Infrastruktur karena perusahaan yang akan saya teliti yaitu Perum Jasa Tirta II memiliki kegiatan menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat luas seperti

pembangkitan, pendistribusian tenaga listrik, bendungan, irigasi serta pengadaan sarana rekreasi. Hal inilah yang mendorong saya tertarik untuk meneliti perusahaan BUMN Infrastruktur.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Metode tersebut merupakan suatu bentuk penelitian dimana penulis meneliti secara langsung pada perusahaan yang menjadi tujuan penelitian. Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan merupakan data yang berasal dari hasil operasi perusahaan yang bersangkutan sehingga hasil perhitungannya hanya berlaku bagi perusahaan tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II Jatiluhur pada tanggal 1 sampai dengan 24 November 2006.

C. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitian adalah orang-orang dalam perusahaan yang akan menjadi sasaran dari penelitian ini atau mereka yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kepala Biro Keuangan, Kepala bagian Operasi dan Kepala Biro Bina Usaha. Sedangkan obyek penelitian adalah sumber-sumber data yang akan diteliti. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Neraca Perum Jasa Tirta II dari tahun 2001-2004.

D. Teknik Analisa Data

Analisis yang dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan BUMN yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Total bobot penilaian aspek keuangan untuk BUMN Infrastruktur sebesar 50.

Indikator yang dinilai serta bobot-bobotnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Indikator serta Bobot Infrastruktur

Indikator	Bobot
1. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)	15
2. Imbalan Investasi (ROI)	10
3. Rasio Kas	3
4. Rasio Lancar	4
5. <i>Collection Periods</i>	4
6. Perputaran Persediaan	4
7. Perputaran Total Aset	4
8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	6
Total Bobot	50

1. Menghitung rasio tingkat kesehatan BUMN berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, dilihat dari aspek keuangan terdiri dari:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return On Equity (ROE)*.

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Keterangan:

Imbalan Kepada Pemegang Saham mengukur kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham.

Laba Setelah Pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari: aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.

Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.

Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2 Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	SKOR
	INFRA
15 < ROE	15
13 < ROE ≤ 15	13,5
11 < ROE ≤ 13	12
9 < ROE ≤ 11	10,5
7,9 < ROE ≤ 9	9
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5
5,3 < ROE ≤ 6,6	6
4 < ROE ≤ 5,3	5
2,5 < ROE ≤ 4	4
1 < ROE ≤ 2,5	3
ROE ≤ 1	1,5
ROE ≤ 0	1

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

b Imbalan Investasi atau *Return On Investment (ROI)*.

$$ROI = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Keterangan:

Imbalan Investasi mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih.

EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan: aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.

Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi dan deplesi.

Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 3 Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	SKOR
	INFRA
18 < ROI	10
15 < ROI ≤ 18	9
13 < ROI ≤ 15	8
12 < ROI ≤ 13	7
10,5 < ROI ≤ 12	6
9 < ROI ≤ 10,5	5
7 < ROI ≤ 9	4
5 < ROI ≤ 7	3,5
3 < ROI ≤ 5	3
2 < ROI ≤ 3	2,5
0 ROI ≤ 1	2
ROI ≤ 0	0

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

c. Rasio Kas atau *Cash Ratio*.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kas, Bank, Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.

Kewajiban lancar adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 Daftar Skor Penilaian Rasio Kas

Rasio Kas = X(%)	SKOR
	INFRA
$X > = 35$	3
$25 < = X < = 35$	2,5
$15 < = X < = 25$	2
$10 < = X < = 15$	1,5
$5 < = X < = 10$	1
$0 < = X < = 5$	0

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

d. Rasio Lancar atau *Current Ratio*.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Aktiva Lancar adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.

Kewajiban Lancar adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 Daftar Skor Penilaian *Current Ratio*

<i>Current Ratio</i> = X (%)	SKOR
	INFRA
125 < X	3
110 < X < 125	2,5
100 < X < 110	2
95 < X < 100	1,5
90 < X < 95	1
X < 90	0

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

b. *Collection Periods.*

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Keterangan:

Total Piutang Usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.

Total Pendapatan Usaha adalah total pendapatan usaha selama tahun buku.

Tabel 6 Daftar Skor Penilaian *Collection Periods*

CP = X (Hari)	Perbaikan = X (Hari)	SKOR
		INFRA
$X \leq 60$	$X \geq 35$	4
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	3,5
$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	3
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	2,5
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	2
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	1,6
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	1,2
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 6$	0,8
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	0,4
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

c. Perputaran Persediaan.

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Keterangan:

Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.

Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

PP = X (Hari)	Perbaikan = X (Hari)	SKOR
		INFRA
$X \leq 60$	$35 < X$	4
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	3,5
$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	3
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	2,5
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	2
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	1,6
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	1,2
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 6$	0,8
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	0,4
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

d. Perputaran Total Asset atau Total Asset Turn Over (TATO)

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Pendapatan adalah Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.

Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 8 Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Asset

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	SKOR
		INFRA
120 < X	20 < X	4
105 < X ≤ 120	15 < X ≤ 20	3,5
90 < X ≤ 105	10 < X ≤ 15	3
75 < X ≤ 90	5 < X ≤ 10	2,5
60 < X ≤ 75	0 < X ≤ 5	2
40 < X ≤ 60	X ≤ 0	1,5
20 < X ≤ 40	X ≤ 0	1
X ≤ 20	X ≤ 0	0,5

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

e. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS thd TA)

$$\text{TMS thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 Daftar Skor Penilaian Ratio Modal Sendiri Terhadap TA

TMS thd TA (%) = X	SKOR
	INFRA
$X \leq 0$	0
$0 <= X <= 10$	2
$10 <= X <= 20$	3
$20 <= X <= 30$	4
$30 <= X <= 40$	6
$40 <= X <= 50$	5,5
$50 <= X <= 60$	5
$60 <= X <= 70$	4,5
$70 <= X <= 80$	4,25
$80 <= X <= 90$	4
$90 <= X <= 100$	3,5

Sumber: SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

2. Menentukan bobot tingkat kesehatan BUMN berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 dilihat dari aspek keuangan adalah sebagai berikut:

Adapun skor ketiga aspek tersebut berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keuangan (Total Skor Keuangan/SK) = 50 atau 0,5
2. Aspek Operasional (Total Skor Operasional/TSOP) = 35 atau 0,35
3. Aspek Administrasi (Total Skor Administrasi/SAD) = 15 atau 0,15

Untuk mengetahui proporsi khusus pada aspek keuangan maka dilakukan sebagai berikut. Aspek keuangan total skornya sebesar 50 dan untuk mencari sumbangan aspek keuangan terhadap total skor (TS = 100) yaitu

total skor keuangan (TSK) dibagi dengan total skor (TS) dikalikan bobot masing-masing. Dengan demikian proporsinya:

1. Sehat, yang terdiri dari:

AAA apabila total skor keuangan (TSK) lebih besar dari $0,5 \times 95$

AA apabila $0,5 \times 80 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 95$

A apabila $0,5 \times 65 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 80$

2. Kurang Sehat, yang terdiri dari:

BBB apabila $0,5 \times 50 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 65$

BB apabila $0,5 \times 40 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 50$

B apabila $0,5 \times 30 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 40$

3. Tidak Sehat, yang terdiri dari:

CCC apabila $0,5 \times 20 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 30$

CC apabila $0,5 \times 10 < \text{TSK} \leq 0,5 \times 20$

C apabila $\text{TSK} \leq 0,5 \times 10$

Apabila diringkas sumbangan total skor keuangan (TSK) terhadap total skor keseluruhan adalah (TS):

1. Sehat, yang terdiri dari:

AAA apabila total skor keuangan (TSK) lebih besar dari 47,5

AA apabila $40 < \text{TSK} \leq 47,5$

A apabila $32,5 < \text{TSK} \leq 40$

2. Kurang Sehat, yang terdiri dari:

BBB apabila : $25 < \text{TSK} \leq 32,5$

BB apabila : $20 < \text{TSK} \leq 25$

B apabila : $15 < \text{TSK} \leq 20$

3. Tidak Sehat, yang terdiri dari:

CCC apabila : $10 < \text{TSK} \leq 15$

CC apabila : $5 < \text{TSK} \leq 10$

C apabila : $\text{TSK} \leq 5$

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Perusahaan

Pengembangan sumber daya air terpadu sungai-sungai di Jawa Barat bagian utara menjadi satu kesatuan hidrologis dengan citarum sebagai sumber utama. Bentuk pengelolaan bendungan/waduk, PLTA dan jaringan pengairan Jatiluhur sejak dibentuk tahun 1957 sampai dengan sekarang adalah:

1. Proyek Serbaguna Jatiluhur (1957 - 1967)

Pembangunan Proyek Nasional Serbaguna Jatiluhur yang meliputi Waduk/Bendungan Utama dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta sarana sistem pengairannya dinyatakan selesai pada tahun 1967. Proyek Serbaguna Jatiluhur merupakan Tahap I dari pengembangan sumber daya air di wilayah sungai citarum dengan tujuan utama meningkatkan produksi bahan pangan nasional yaitu beras. Untuk mengenang jasa salah satu putra terbaik bangsa Indonesia Bendungan dan PLTA Jatiluhur diresmikan dengan nama Ir. H. Djuanda.

2. Perusahaan Negara/ PN Jatiluhur (1967 - 1970)

Agar potensi yang timbul dengan selesainya proyek PLTA Jatiluhur dapat diusahakan secara maksimal maka dibentuk Badan Usaha Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Jatiluhur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1967 tanggal 24 Juli 1967.

3. Perum "Otorita Jatiluhur" (1970- 1998)

Sebagai Badan Usaha, pada waktu itu PN. Jatiluhur dalam usahanya harus memupuk keuntungan. Penyediaan air untuk pertanian yang bersifat sosial diusahakan secara komersial, sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi tidak harmonis dan tujuan utama proyek menjadi tidak tercapai.

Agar pemanfaatan dan pengembangan potensi-potensi yang timbul dilaksanakan secara efektif dan efisien maka pengurusannya harus didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan dasar tersebut maka Pemerintah membentuk Perusahaan Umum dengan nama "Otorita Jatiluhur" dengan dibentuknya POJ, maka badan-badan/proyek-proyek dan dinas-dinas yang berada di wilayah pengembangannya dan yang tugas serta kewajibannya menyangkut tujuan, tugas dan lapangan usaha POJ, dilebur ke dalam POJ. Badan-badan tersebut adalah Proyek Irigasi Jatiluhur (Dep. PU), Proyek Pengairan Tersier Jatiluhur (Dep. Dagri), PN Jatiluhur (Dep. Industri), Dinas PU Jawa Barat Wilayah Purwakarta (Propinsi Jabar).

4. Perum Jasa Tirta II (1998)

Perum Otorita Jatiluhur dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1970, kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1980 dan pada tahun 1990 disesuaikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum, maka POJ diubah dan disesuaikan dengan nama Perum Jasa Tirta II (PJT II) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 1999. Sifat

usaha PJT II adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

B. Filosofi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah terwujudnya perusahaan yang terkemuka dan berkualitas dalam pengelolaan air dan sumber air untuk memberikan pelayanan terbesar dalam penyediaan air untuk berbagai kebutuhan dan sumbangan terhadap ketahanan pangan nasional.

2. Misi Perusahaan

Perum Jasa Tirta II mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Penyediaan air baku untuk minum, listrik, pertanian, industri, pelabuhan, penggelontoran dan kebutuhan lainnya.
- b. Pembangkitan dan penyaluran listrik tenaga air.
- c. Pengembangan kepariwisataan dan pemanfaatan lahan.
- d. Mempertahankan ketahanan pangan melalui penyediaan air pertanian dan pengendalian bahaya banjir dengan upaya pelestarian perlindungan lingkungan melalui pemberian informasi, rekomendasi dan penyuluhan.
- e. Memaksimalkan laba dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip bisnis untuk terjaminnya kelestarian asset negara dan kesinambungan layanan kepada masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud didirikannya PJT II adalah menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah pengaliran sungai dan atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan. Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional dalam bidang pengelolaan air, sumber-sumber air dan tenaga listrikan.

4. Motto Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 1/43/KPTS/1975 telah ditetapkan pula motto PERUM Otorita Jatiluhur yang berbunyi "BERKEMBANG DAN BERBAKTI" yang diwujudkan dengan kerja keras dan disiplin didalam melaksanakan tugas pokok oleh setiap jajaran organisasi, telah membuahkan hasil nyata dengan diraihnya Sertifikat Sistem Jaminan Mutu ISO - 9001 tahun 1994 dengan ruang lingkup: penyediaan air baku untuk DKI Jakarta, pembangkitan dan penyaluran listrik PLTA Ir. Djuanda. "Berkembang dan Berbakti" secara lebih luas dapat diartikan:

1. "Bekerja untuk kepentingan dunia seakan-akan kita akan hidup abadi" mempunyai arti bahwa seakan-akan kita semua, baik yang tua maupun yang muda, akan sempat mengalami/menikmati hasil karya kita, dan

karnanya kita, baik yang tua maupun yang muda, sanggup bekerja dengan semangat dan dedikasi yang sama, sehingga kita sama sama berkembang.

2. “Bekerja untuk kepentingan akhirat seakan-akan kita akan segera mati esok hari”. Mempunyai arti bahwa kita setiap saat harus berusaha untuk menepati ajaran-ajaran agama, menunaikan tugas kewajiban sebaik-baiknya serta BERBAKTI sehingga kita setiap saat dapat mempertanggung jawabkan segenap tugas kewajiban kita karena hidup kita ada ditangan Tuhan Yang Maha Esa yang setiap saat dapat pula mengakhirinya..

Dengan demikian ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi: Bekerja untuk kepentingan dunia seakan-akan kita hidup abadi, dan bekerja untuk kepentingan akhirat seakan-akan kita akan mati esok hari” dapat dicerminkan dalam motto Perum Otorita Jatiluhur yang berbunyi: ”BERKEMBANG DAN BERBAKTI”.

Demikianlah diharapkan di tahun-tahun mendatang perusahaan akan selalu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta mempertahankan PJT II sebagai perusahaan yang sehat dan wajar tanpa pengecualian, untuk turut serta membangun ekonomi regional dan rasional berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

C. Strategi Perusahaan

1. Strategi Bisnis

Secara umum strategi perusahaan adalah meningkatkan kinerja dari bidang-bidang:

- a. Bidang Produksi dan Operasi.
- b. Bidang Pemasaran dan Pendapatan.
- c. Bidang Investasi.
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Dirtek).
- e. Bidang Penugasan Pemerintah.
- f. Bidang Organisasi dan Manajemen (Diradku).
- g. Bidang Sumber Daya Manusia (Diradku).
- h. Bidang Keuangan (Diradku).

2. Strategi Produksi Perusahaan

- a. Meningkatkan kehandalan unit pembangkit PLTA Ir. H. Juanda dalam rangka meningkatkan produksi listrik.
- b. menggalakkan pemasaran ke pelanggan untuk jasa konsultasi teknik.
- c. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana produksi.
- d. Pengembangan produk.

3. Strategi Pemasaran

- a. Peningkatan nilai jual produksi air baku, air bersih, listrik, kepariwisataan dan pemanfaatan lahan.
- b. Memperkenalkan usaha perusahaan atau memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan dalam bentuk: Iklan, pameran, sponsor kegiatan, brosur, leaflet, jaminan relasi, kehumasan dan publikasi tentang PJT II dll.
- c. Membina hubungan kerja yang sehat dan saling menguntungkan, baik dengan pemakai jasa maupun dengan pihak lain.

4. Teknologi dan R/D

Program pengembangan dan riset perusahaan: mengadakan penelitian tentang kelayakan rencana pendirian anak perusahaan di bidang kelistrikan dan kepariwisataan.

5. Strategi Sumber Daya Manusia

- a. Melaksanakan berbagai jenis diklat sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan pendidikan berjenjang.
- b. Mengadakan pengendalian jumlah pegawai agar sesuai dengan jumlah dan kualitas.
- c. Regenerasi melalui mekanisme mengganti tenaga yang telah pensiun dengan yang baru.

6. Strategi Rekanan

Kebijakan perusahaan adalah peningkatan sistem manajemen mutu yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan jaminan mutu.

7. Pengabdian Masyarakat

Mengadakan pembinaan terhadap UKK dan upaya pengendalian kualitas air serta memberikan jaminan mutu dan kepuasan pelanggan.

D. Pelayanan Umum

1. Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.1232/KMK.013/1989, juncto Keputusan Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994 serta Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPEL & K) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum tahun 1992 No.UM.04.04-MN/500 Perum Otorita Jatiluhur telah melaksanakan Program Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi sejak tahun 1991. Dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada Koperasi dan Usaha Kecil serta Program SPK MK (Sarjana Pelaksana Konsultasi Manajemen Koperasi), PJT II telah memberikan bantuan dana kepada KUD Desa Tertinggal, sebanyak 540 Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 2 milyar. Pada tahun 1996 PUKK PJT II mendapat penghargaan UPAKARTI.

2. Kepedulian Lingkungan Hidup

Program peduli lingkungan yang dilaksanakan perusahaan adalah dengan mengikuti "Program Kali Bersih" dan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan, antara lain dengan mengadakan pemantauan kualitas air Sungai yang termasuk dalam pengelolaan PJT II.

3. Bidang Sosial

Sesuai dengan "Tugas Perbantuan" dari pemerintah, perusahaan melaksanakan penyediaan dan pemberian air irigasi kepada petani seluas 320.000 Ha dan melaksanakan "Pengendalian Banjir".

3.1. Pengelolaan Irigasi

Dalam rangka meningkatkan penyediaan bahan pangan Nasional terutama beras, Perusahaan senantiasa mengupayakan penyediaan air sejumlah 5,75 milyar m³ setiap tahun bagi pertanian sawah di Citarum Hilir seluas 318.000 ha, yang meliputi daerah irigasi Jatiluhur seluas 240.000 ha, dua kali tanam dalam setahun dan daerah irigasi selatan Jatiluhur seluas 78.000 ha dari sumber sumber air setempat. Disamping itu menyediakan air untuk berbagai kepentingan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

3.2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Dalam pengelolaan daerah aliran sungai, Perum Jasa Tirta II melaksanakan tugas operasi dan pemeliharaan sarana serta prasarana

pengairan, melestarikan, mengembangkan dan menggunakan air dan sumber-sumber air, memberikan informasi, rekomendasi, bimbingan dan penyuluhan.

4. Pelayanan Pelanggan (Customer Service)

Memberikan jaminan mutu dalam rangka untuk kepuasan seluruh pelanggan.

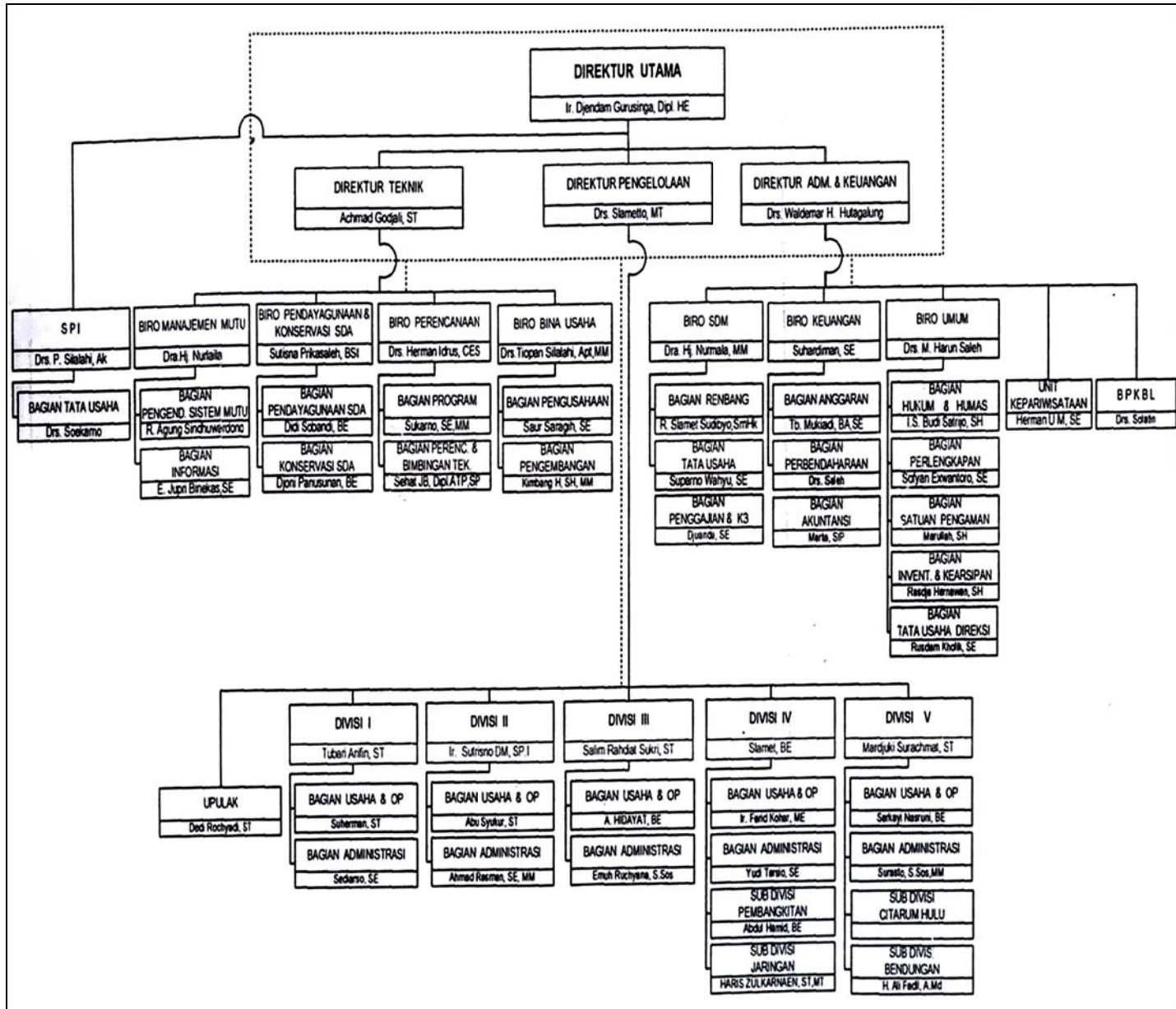
E. Lokasi Perusahaan

Perum Jasa Tirta II berlokasi dan berkantor pusat di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Telp. (0264) 201972 (HUNTING), Fax. (0264) 201971.

F. Struktur Organisasi

Direktur Utama	: Ir. Djendam Gurusinga, Dipl. HE.
Direktur Teknik	: Achmad Godjali, ST.
Direktur Pengelolaan	: Drs. Slametto, MT.
Direktur Adm. & Keuangan	: Drs. Waldemar H. Hutagalung.
Satuan Pengawas Intern	: Drs. P. Silalahi, Ak.
Biro Manajemen Mutu	: Dra. Hj. Nurlaila.
Biro PKSDA	: Sutisna Prikasaleh, B.St.
Biro Perencanaan	: Drs. Herman Idrus, CES
Biro Bina Usaha	: Drs. Tiopan Silalahi, Apt, MM.
Biro SDM	: Dra. Hj. Nurmala, MM.
Biro Keuangan	: Suhardiman, SE.
Biro Umum	: Drs. M. Harun Saleh.

Gambar I Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II



BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Menghitung Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan.

Rasio tingkat kesehatan keuangan BUMN berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut:

1. Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return On Equity (ROE)*.

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 10 Penilaian ROE

Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri	ROE (%)
2001	17.407.762.656	125.072.411.788	13,91
2002	22.784.524.046	132.395.383.424	17,20
2003	2.149.232.619	152.794.713.119	1,40
2004	13.992.061.562	154.854.905.527	9,03

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 13,91%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 modal sendiri mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 0,1391. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 13,5.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 17,20%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 modal sendiri mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp.

- 0,1720. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 15.
- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 1,40%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 modal sendiri mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 0,0140. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.
- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 9,03%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 modal sendiri mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 0,0903. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 10,5.

Pada tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II memperoleh bobot tertinggi yaitu 15 berarti perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik. Namun pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 3 hal ini menunjukkan kemampuan menghasilkan laba pada tahun tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, sehingga perusahaan mengalami sedikit kesulitan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

2. Imbalan Investasi atau *Return On Investment (ROI)*.

$$ROI = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 11 Penilaian ROI

Tahun	EBIT + Penyusutan	<i>Capital Employed</i>	ROI (%)
2001	32.525.294.117	171.021.336.845	19,01
2002	41.886.020.990	191.343.065.779	21,89
2003	15.016.975.340	183.789.342.297	8,17
2004	31.607.112.044	205.444.653.758	15,38

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 19,01%, artinya bahwa setiap Rp. 1,00 *capital employed* yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) sebesar Rp. 0,1901. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 10.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 21,89%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 *capital employed* yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) sebesar Rp. 0,2189. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 10.
- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 8,17%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 *capital employed* yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum

bunga dan pajak (EBIT) sebesar Rp. 0,0817. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.

- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 15,38%, artinya bahwa setiap Rp. 1,00 *capital employed* yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) sebesar Rp. 0,1538. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 9.

Selama tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II memperoleh bobot tertinggi yaitu 10, berarti laba yang dicapai perusahaan menunjukkan peningkatan yang baik sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam mengembalikan investasi yang dilakukan dengan menggunakan seluruh aktiva.

3. Rasio Kas atau *Cash Ratio*.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 12 Penilaian Rasio Kas

Tahun	Kas+Bank+ Surat Berharga Jk. Pendek	Kewajiban Lancar	CR(%)
2001	31.884.166.258	11.133.399.745	286,38
2002	35.786.996.500	13.378.634.263	267,49
2003	6.131.658.219	26.184.742.682	23,41
2004	23.478.605.161	22.588.643.926	103,93

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 286,38%, artinya bahwa setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp. 2,8638 kas dan surat berharga jangka pendek. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 267,49%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp. 2,6749 kas dan surat berharga jangka pendek. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.
- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 23,41%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp. 0,2341 kas dan surat berharga jangka pendek. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 2,5.
- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 103,93%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp. 1,0393 kas dan surat berharga jangka pendek. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.

Kemampuan untuk membayar hutang lancar dengan kas sangat baik, hanya pada tahun 2003 mengalami penurunan yaitu 2,5.

4. Rasio Lancar atau *Current Ratio*.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Tabel 13 Penilaian Rasio Lancar

Tahun	Current Asset	Current Liabilities	CR (%)
2001	53.020.961.849	11.133.399.745	476,23
2002	61.607.561.838	13.378.634.263	460,49
2003	47.590.652.371	26.184.742.682	181,74
2004	53.163.639.219	22.588.643.926	235,35

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 476,23%, ini berarti setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin dengan Rp. 4,7623 aktiva lancar. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 460,49%, ini berarti setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin dengan Rp. 4,6049 aktiva lancar. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.
- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 181,74%, artinya bahwa setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin dengan Rp. 1,8174 aktiva lancar. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.
- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 235,35%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin dengan Rp. 2,3535 aktiva lancar.

Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 3.

Pada tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II memperoleh bobot tertinggi yaitu 3, berarti Perum Jasa Tirta II dalam kondisi sehat.

5. *Collection Periods*.

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel 14 Penilaian *Collection Periods*

Tahun	Total Piutang Usaha	Total Pendapatan Usaha	CP (Hari)
2001	3.370.443.673	113.153.262.458	11
2002	7.210.880.159	132.684.579.919	20
2003	8.200.327.199	111.094.144.719	27
2004	9.213.411.361	143.699.256.713	23

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 11 hari, artinya sejak perusahaan melakukan penjualan kredit sampai dengan menerima pembayaran kas diperlukan waktu selama 11 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 20 hari, artinya sejak perusahaan melakukan penjualan kredit sampai dengan menerima pembayaran kas

diperlukan waktu selama 20 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.

- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 27 hari, artinya sejak perusahaan melakukan penjualan kredit sampai dengan menerima pembayaran kas diperlukan waktu selama 27 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.
- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 23 hari, artinya sejak perusahaan melakukan penjualan kredit sampai dengan menerima pembayaran kas diperlukan waktu selama 23 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4. Ada perbaikan sebesar 4 hari, maka bobot untuk perbaikan CP sebesar 0,8. Bobot yang dipilih adalah bobot terbesar, maka yang digunakan adalah 4.

Dari tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II memperoleh bobot tertinggi yaitu 4, berarti pengumpulan total piutang perusahaan dikatakan baik dan efektif.

6. Perputaran Persediaan.

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel 15 Penilaian Perputaran Persediaan

Tahun	Total Persediaan	Total Pendapatan Usaha	PP (Hari)
2001	3.285.856.467	113.153.262.458	11
2002	4.721.795.696	132.684.579.919	13
2003	3.131.525.171	111.094.144.719	10
2004	2.674.290.715	143.699.256.713	7

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 11 hari, artinya rata-rata persediaan tersimpan digudang selama 11 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 13 hari, artinya rata-rata persediaan tersimpan digudang selama 13 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.
- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 10 hari, artinya rata-rata persediaan tersimpan digudang selama 10 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4. Ada perbaikan PP sebesar 3 hari, berdasarkan daftar memperoleh bobot sebesar 0,4. Bobot perbaikan

lebih kecil dibandingkan bobot tahun yang dianalisis, jadi yang dipilih adalah bobot tahun yang dianalisis sebesar 4.

- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 7 hari, artinya rata-rata persediaan tersimpan digudang selama 7 hari. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4. Ada perbaikan sebesar 3 hari, maka bobot untuk perbaikan PP sebesar 0,4. Bobot yang dipilih adalah bobot terbesar, maka yang digunakan adalah 4.

Perputaran Persediaan dari tahun 2001-2004 mempunyai skor tertinggi yaitu 4.

7. Perputaran Total Asset atau *Total Asset Turn Over (TATO)*

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 16 Penilaian Perputaran Total Asset

Tahun	Total Pendapatan	Capital Employed	TATO (%)
2001	127.942.946.948	171.021.336.845	74,81
2002	154.008.646.655	191.343.065.779	80,48
2003	114.805.454.744	183.789.342.297	62,46
2004	153.516.457.567	205.444.653.758	74,72

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 74,81%, artinya setiap Rp. 1,00 *capital employed* mampu menghasilkan total pendapatan sebesar Rp. 0,7481. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 2.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 80,48%, artinya setiap Rp. 1,00 *capital employed* mampu menghasilkan total pendapatan sebesar Rp. 0,8048. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 2,5. Ada perbaikan Perputaran Total Aset sebesar 5,67%, berdasarkan daftar memperoleh bobot sebesar 2,5. Bobot perbaikan sama dengan bobot tahun yang dianalisis, jadi yang dipilih adalah bobot tahun yang dianalisis sebesar 2,5.
- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 62,46%, artinya setiap Rp. 1,00 *capital employed* mampu menghasilkan total pendapatan sebesar Rp. 0,6446. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 2.
- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 74,72%, artinya setiap Rp. 1,00 *capital employed* mampu menghasilkan total pendapatan sebesar Rp. 0,7472. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 2. Ada perbaikan sebesar 12,26%, maka bobot untuk perbaikan Perputaran Total Aset sebesar 3. Maka bobot yang digunakan adalah 3.

Selama tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II memperoleh bobot tertinggi untuk *Total Asset Turn Over* adalah 3. Berarti pengelolaan aktiva pada Perum Jasa Tirta II adalah baik.

8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS thd TA)

$$\text{TMS thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 17 Penilaian TMS thd TA

Tahun	Total Modal Sendiri	Total Asset	TMS Thd TA (%)
2001	137.833.646.197	174.704.495.465	78,89
2002	146.932.187.705	191.734.150.029	76,63
2003	158.578.635.621	196.261.997.555	80,79
2004	160.687.868.240	206.123.520.284	77,95

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2001-2004

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bobot yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2001 diperoleh hasil sebesar 78,89%, ini berarti setiap Rp. 1,00 total aktiva menjamin Rp. 0,7889 total hutang. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4,25.
- b. Tahun 2002 diperoleh hasil sebesar 76,63%, ini berarti setiap Rp. 1,00 total aktiva menjamin Rp. 0,7663 total hutang. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4,25.

- c. Tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 80,79%, ini berarti setiap Rp. 1,00 total aktiva menjamin Rp. 0,8079 total hutang. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4.
- d. Tahun 2004 diperoleh hasil sebesar 77,95%, ini berarti setiap Rp. 1,00 total aktiva menjamin Rp. 0,7795 total hutang. Berdasarkan daftar bobot menurut Keputusan Menteri BUMN adalah sebesar 4,25.

B. Perhitungan Masing-masing Indikator.

Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing indikator pada Perum Jasa Tirta II dari tahun 2001-2004, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Hasil Perhitungan Masing-masing Indikator

No.	Indikator	2001	2002	2003	2004
1	ROE	13,91%	17,20%	1,40%	9,03%
2	ROI	19,01%	21,89%	8,17%	15,38%
3	<i>Cash Ratio</i>	286,38%	267,49%	23,41%	103,93%
4	<i>Current Ratio</i>	476,23%	460,49%	181,74%	235,35%
5	<i>Collection Periods</i>	11 hari	20 hari	27 hari	23 hari
6	Perputaran Persediaan	11 hari	13 hari	10 hari	7 hari
7	TATO	74,81%	80,48%	62,46%	74,72%
8	TMS thd TA	78,89%	76,63%	80,79%	77,95%

Sumber: Data yang diolah dari tahun 2001-2004

Secara rinci bobot keuangan Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002:

Tabel 19 Rincian Bobot Aspek Keuangan

No.	Indikator	2001	2002	2003	2004
1	ROE	13,5	15	3	10,5
2	ROI	10	10	4	9
3	<i>Cash Ratio</i>	3	3	2,5	3
4	<i>Current Ratio</i>	3	3	3	3
5	<i>Collection Periods</i>	4	4	4	4
6	Perputaran Persediaan	4	4	4	4
7	TATO	2	2,5	2	3
8	TMS thd TA	4,25	4,25	4	4,25
TOTAL		43,75	45,75	26,5	40,75

Sumber: Data yang diolah dari tahun 2001-2004

Dari tabel 19 yang berisikan rincian bobot aspek keuangan yang diperoleh Perum Jasa Tirta II sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahun 2001

Pada tahun 2001 bobot yang dicapai oleh perusahaan sebesar 43,75. Bobot ini hampir mencapai maksimal. Menurut SK Menteri BUMN bobot maksimal yaitu 47,5. Kekurangan terjadi pada tiga indikator yaitu ROE, *Current Ratio*, dan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset.

2. Tahun 2002

Total bobot yang diperoleh 45,75. Pada tahun ini mengalami kenaikan bobot keuangan dibanding tahun 2001 sebesar 2. Kekurangan bobot terjadi sama dengan tahun 2001 yaitu ROE, *Current Ratio*, dan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset. Bobot ini hampir mencapai maksimal. Menurut SK Menteri BUMN bobot maksimal yaitu 47,5.

3. Tahun 2003

Total bobot keuangan sebesar 26,5 dan merupakan bobot terendah dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian bobot tidak maksimal pada dua indikator yaitu ROE, dan ROI.

4. Pada tahun 2004 bobot yang dicapai oleh perusahaan sebesar 40,75. Pada tahun ini mengalami kenaikan bobot keuangan dibanding tahun 2003 sebesar 14. Kekurangan bobot terjadi sama dengan tahun 2001 yaitu ROE, *Current Ratio*, dan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset.

Berdasarkan hasil perhitungan semua indikator, maka dapat ditentukan tingkat kesehatan keuangan Perum Jasa Tirta II dari tahun 2001-2004 dengan memasukan total semua indikator yang telah diperoleh kedalam penilaian tingkat kesehatan keuangan menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Tingkat Kesehatan Keuangan

Tahun	Total Bobot	Keterangan	Tingkat Kesehatan
2001	43,75	SEHAT	AA
2002	45,75	SEHAT	AA
2003	26,5	KURANG SEHAT	BBB
2004	40,75	SEHAT	AA

Sumber: Data diolah

Dengan demikian, dari tabel 20 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik atau sehat pada tahun 2001, 2002 serta 2004. Penurunan dua tingkat terjadi pada tahun 2003, yang berada pada kondisi yang kurang sehat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tentang tingkat kesehatan keuangan Perum Jasa Tirta II dari data laporan keuangan tahun 2001-2004 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan pada aspek keuangan menunjukkan bahwa kinerja Perum Jasa Tirta II memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sehat pada tahun 2001, 2002 dan 2004. Kategori tingkat kesehatan keuangan yang dicapai berada pada golongan AA dengan bobot tertinggi pada tahun 2002 sebesar 46. Kecuali tahun 2003 Perum Jasa Tirta II mengalami penurunan dua tingkat menjadi Kurang Sehat BBB dengan bobot 26,5.

B. Keterbatasan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data dan pembahasan dengan asumsi bahwa data yang diperoleh menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi dan hanya sebatas aspek keuangannya saja.

C. Saran

Dari kesimpulan yang ada selama tahun 2001-2004 Perum Jasa Tirta II sudah dapat mengelola keuangan dengan baik pada tahun 2001, 2002, dan 2004 hanya pada tahun 2003 Perum Jasa Tirta mengalami kondisi yang kurang sehat pada golongan BBB. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya dan memperbaiki rasio tertentu yang pengelolaannya kurang baik terutama ROE dengan cara meningkatkan penjualan dan menekan biaya sehingga laba yang diperoleh meningkat, dan pencapaian bobotnya dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. 2003. *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. (Kelompok Gramedia)
- Asmara, Gabriela Tega. 2006. Analisis Tingkat Kesehatan Finansial Perusahaan BUMN Berdasarkan SK. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM
- Hapsari, Indri. 2005. Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Berdasarkan SK. Menteri Keuangan RI. No. 198/KMK.016/1998. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Husnan, Suad dan Eni Pujiastuti. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Munawir. 2002. *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Nogi, Hessel. 2003. *Memahami Kinerja Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: Balairung & Co
- Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yogyakarta. 2007. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Edisi refisi. Yogyakarta: UMP YKPN
- Menteri Badan Usaha Milik Negara, Surat Keputusan Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
- Simangunsong, MP. 1995. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua, Jakarta: Karya Utama

LAMPIRAN



Nomor : 11/DAK/1093/2006
Lampiran : -

Jatiluhur, 20 Nopember 2006

Kepada Yth.
Ketua Program studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta

Perihal : Ijin Survey / Penelitian / Pengumpulan Data

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 31/Kaprodi Akt.331/XI/2006 tanggal 17 November 2006 perihal sebagaimana pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk melaksanakan survey / penelitian / pengumpulan data di Perum Jasa Tirta II.

Dalam pelaksanaannya, yang bersangkutan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perum Jasa Tirta II.
2. Menanggung biaya selama melaksanakan survey/penelitian/pengumpulan data.
3. Perusahaan tidak memberikan uang saku/honorarium maupun fasilitas lainnya,
4. Bila terjadi kecelakaan dalam melaksanakan survey/penelitian/pengumpulan data di luar tanggung jawab perusahaan
5. Survey/penelitian/pengumpulan data dilaksanakan dari 1 November 2006 s.d 24 November 2006.

Untuk mendapat petunjuk lebih lanjut guna kelancaran pelaksanaan, agar menghubungi Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro SDM, Perum Jasa Tirta II di Kantor Pusat Jatiluhur.

Demikian agar maklum dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PERUM JASA TIRTA II
Kepala Biro SDM,


Dra. Hj. Nurmala, MM
NIK. 02956 7756

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Administrasi & Keuangan
2. Kepala Biro PKSDA
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Biro Bina Usaha
5. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Umum.

Lampiran Surat Nomor : 11/DAK/1093 /2006
Tanggal : 20 November 2006

DAFTAR PESERTA SURVEY / PENELITIAN / PENGUMPULAN DATA

No.	NAMA	JURUSAN	NARA SUMBER	DATA YANG DIBUTUHKAN
1.	ANTONIUS EKO HARYONO	Akuntansi	Biro Keuangan Biro PKSDA Biro Bina Usaha	* Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan BUMN "

PERUM JASA TIRTA II
NERACA

65

PER 31 DESEMBER 2002 DENGAN PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2001

AKTIVA	Catatan	2002 AUDITED Rupiah	2001 AUDITED Rupiah
I AKTIVA LANCAR			
Kas	3.1	1.440.390.172,00	665.455.000,00
Bank	3.2	10.346.606.328,00	9.718.711.258,00
Deposito	3.3	24.000.000.000,00	21.500.000.000,00
Pembayaran Dimuka	3.4	1.080.482.972,00	810.249.473,00
Piutang Usaha	3.5	7.525.818.428,00	3.838.337.351,00
Penyisihan Piutang Sangsi	3.6	(314.938.269,00)	(467.893.678,00)
Piutang Lain-lain	3.7	17.144.531,00	105.853.852,00
Pendapatan YMHD	3.8	10.685.662.728,00	11.405.063.923,00
Persediaan	3.9	4.721.795.696,00	3.285.856.467,00
Beban Dibayar Dimuka	3.10	2.094.599.252,00	2.159.328.203,00
Jumlah Aktiva Lancar		61.607.561.838,00	53.020.961.849,00
II AKTIVA TETAP	3.11		
Tanah	3.11	14.806.140.125,00	19.767.445.172,00
Bangunan Umum	3.11	40.023.168.072,00	29.815.455.212,00
Jalan, Saluran, Jembatan, Gorong-gorong	3.11	6.503.307.915,00	2.929.687.672,00
Instalasi & Jaringan	3.11	93.158.708.707,00	87.833.089.171,00
Alat Angkutan	3.11	9.655.674.355,00	8.390.670.410,00
Perabot dan Peralatan	3.11	18.667.362.744,00	12.394.750.495,00
		182.814.361.916,00	161.131.098.132,00
Akumulasi Penyusutan	3.11	(56.320.904.665,00)	(46.875.500.052,00)
Jumlah Aktiva Tetap		126.493.457.251,00	114.255.598.080,00
III AKTIVA LAIN-LAIN		(9.445.404.613,00)	
Aktiva Dalam Pelaksanaan	3.12	391.124.250,00	3.683.158.620,00
Beban Ditangguhkan	3.13	4.797.149.780,00	4.147.914.380,00
Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	3.13	(2.446.503.092,00)	(1.294.537.464,00)
Penanaman Cadangan Pada PT. Dana Reksa	3.14	64.200.000,00	64.200.000,00
Penyertaan Keanggotaan Pengembangan Pariwisata	3.15	827.200.000,00	827.200.000,00
Jumlah Aktiva Lain-lain		3.633.170.938,00	7.427.935.536,00
JUMLAH AKTIVA		191.734.190.029,00	174.704.495.465,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUM JASA TIRTA II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2002

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	2002 ✓ AUDITED Rupiah	2001 AUDITED Rupiah
IV KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	3.16	5.280.259.572,00	5.102.470.756,00
Hutang Pajak	3.17	3.416.025.966,00	2.063.638.036,00
Hutang Pelayanan Pariwisata	3.18	9.501.573,00	-
Hutang Lain-lain	3.19	1.682.829.457,00	1.641.748.545,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.20	1.924.595.267,00	1.083.870.402,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.21	1.065.422.428,00	1.241.672.006,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.378.634.263,00 ✓	11.133.399.745,00
V EKUITAS			
Penyertaan Modal Pemerintah	3.22	124.727.335.935,00	124.727.335.935,00
Cadangan Umum	3.23	8.638.044.015,00 ✓	8.329.686.867,00
Cadangan Bertujuan	3.24	22.204.851.770,00	13.106.310.262,00
Jumlah Modal dan Cadangan		155.571.031.720,00	146.163.333.064,00
Laba Yang Belum Dibagi			
Sisa Laba (Rugi) Lalu			17.407.762.656,00
Sisa Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.25	22.784.524.046,00	17.407.762.656,00
Jumlah Ekuitas		178.355.555.766,00 ✓	163.571.095.720,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		191.734.190.029,00	174.704.495.465,00

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN LARA / RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002

URAIAN	Catatan	2002 AUDITED Rupiah	2001 AUDITED Rupiah
I PENDAPATAN USAHA	3.26		
Penjualan Listrik		92.285.927.750,00	78.889.854.500,00
Penjualan Jasa Air		33.131.858.683,00	27.502.253.979,00
Penjualan Jasa Pariwisata		1.611.349.967,00	1.601.175.586,00
Jasa Sewa Lahan		4.122.298.382,00	3.323.536.464,00
Jasa Galian Golongan C		345.972.740,00	529.229.390,00
Jasa Sewa Alat Besar		416.660.354,00	383.269.590,00
Jasa Usaha Lain-lain		770.512.043,00	923.942.949,00
Jumlah Pendapatan Usaha		132.684.579.919,00	113.153.262.458,00
II BEBAN USAHA	3.27		
Beban Pegawai		35.711.880.172,00	32.099.614.708,00
Beban Pemeliharaan Aktiva Tetap		15.127.867.719,00	15.391.670.997,00
Beban Umum dan Administrasi		23.368.752.644,00	18.902.112.183,00
Beban Penggunaan Bahan		4.522.465.737,00	4.674.190.318,00
Beban Survei Riset Dan Pengembangan		3.221.930.500,00	2.519.402.813,00
Beban Penyusutan A.T & Amortisasi		11.065.501.144,00	8.899.630.107,00
Jumlah Beban Usaha		93.018.397.916,00	82.486.921.126,00
Laba (Rugi) Usaha		39.666.182.003,00	30.666.341.332,00
IV PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA			
Pendapatan Diluar Usaha	3.20	21.324.066.736,00	14.789.684.490,00
Beban Diluar Usaha	3.29	(30.169.728.893,00)	(21.830.361.812,00)
Jumlah Pendapatan dan Beban Diluar Usaha		(8.845.662.157,00)	(7.040.677.322,00)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak / EBIT		30.820.519.846,00	23.625.664.010,00
PPh Badan Perkiraan	3.30	8.025.395.800,00	6.148.941.200,00
Koreksi L/R Karena Penetapan Pajak			68.960.154,00
Laba (Rugi) setelah PPh Badan		22.795.124.046,00	17.407.762.656,00

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUM JASA TIRTA II
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

AKTIVA	CATATAN	31 Desember 2004 Rp	31 Desember 2003 Rp
AKTIVA LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.1	23.478.605.161	6.131.658.219
Pembayaran Dimuka	3.2	-	1.734.624.906
Piutang Usaha	3.3	10.301.357.923	8.602.466.616
Penyisihan Piutang Sangsi	3.4	(1.087.956.562)	(402.139.417)
Piutang Lain-lain	3.5	65.000.000	141.479.575
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	3.6	11.517.376.809	23.081.382.671
Persediaan	3.7	2.674.290.715	3.131.525.171
Beban Dibayar Dimuka	3.8	2.424.016.883	1.871.424.340
Pajak dibayar dimuka	3.9	3.790.938.290	3.298.230.290
Jumlah Aktiva Lancar		<u>53.163.639.219</u>	<u>47.590.652.371</u>
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Aktiva Tetap			
Nilai Perolehan		225.414.033.310	198.225.190.270
Akumulasi Penyusutan		(76.885.843.507)	(64.521.824.916)
Nilai Buku Aktiva Tetap	3.10	148.528.089.803	133.703.365.354
Aktiva Dalam Pelaksanaan	3.11	678.866.526	12.472.655.258
Aktiva Lain-lain			
Beban Ditangguhkan	3.12	2.925.724.736	1.668.124.572
Keanggotaan Pengemb. Pariwisata	3.13	827.200.000	827.200.000
Jumlah Aktiva Lain-Lain		<u>3.752.924.736</u>	<u>2.495.324.572</u>
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		<u>152.959.881.065</u>	<u>148.671.345.184</u>
JUMLAH AKTIVA		<u>206.123.520.284</u>	<u>196.261.997.555</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	3.14	7.140.077.072	9.885.592.544
Hutang Bank		-	6.000.000.000
Hutang Pajak	3.15	3.230.841.757	1.159.104.436
Hutang Pelayanan Pariwisata	3.16	26.667.529	25.649.837
Hutang Lain-lain	3.17	5.065.785.106	2.256.238.144
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.18	4.362.254.835	4.466.422.070
Pendapatan Diterima Dimuka	3.19	2.763.017.627	2.391.735.651
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>22.588.643.928</u>	<u>26.184.742.682</u>
Kewajiban Pajak Tangguhan	3.20	16.981.181	511.421.258
EKUITAS			
Penyertaan Modal Pemerintah	3.21	124.727.335.935	124.727.335.935
Cadangan Umum	3.22	8.837.965.375	8.837.965.375
Cadangan Bertujuan	3.23	35.960.532.305	33.851.299.688
Jumlah Modal dan Cadangan		<u>169.525.833.615</u>	<u>167.416.600.998</u>
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.24	13.992.061.562	2.149.232.619
Jumlah Ekuitas		<u>183.517.895.177</u>	<u>169.565.833.615</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>206.123.520.284</u>	<u>196.261.997.555</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN LABA / RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

URAIAN	Catatan	2004 Rp	2003 Rp
I PENDAPATAN USAHA	3,25		
Penjualan Listrik		84.086.619.684	60.130.337.963
Penjualan Jasa Air		49.327.216.840	42.978.333.711
Penjualan Jasa Pariwisata		3.494.555.331	1.910.237.500
Jasa Sewa Lahan		4.685.900.447	3.607.119.894
Jasa Galian Golongan C		441.649.300	905.425.280
Jasa Sewa Alat Besar		498.711.900	549.727.370
Jasa Usaha Lain-lain		1.164.603.211	1.012.962.946
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>143.699.256.713</u>	<u>111.094.144.719</u>
II BEBAN USAHA	3,26		
Beban Pegawai		45.025.861.300	35.846.838.028
Beban Pemeliharaan Aktiva Tetap		22.988.191.320	21.217.282.972
Beban Umum dan Administrasi		28.160.999.929	24.845.114.270
Beban Penggunaan Bahan		6.029.906.032	3.330.942.439
Beban Survei Riset Dan Pengembangan		4.631.198.709	4.169.949.616
Beban Penyusutan A.T & Amortisasi		13.746.683.359	11.517.036.045
Jumlah Beban Usaha		<u>120.582.840.649</u>	<u>100.727.163.370</u>
III Laba (Rugi) Usaha		<u>23.116.416.064</u>	<u>10.366.981.349</u>
IV PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA			
Pendapatan Diluar Usaha	3,27		
Jasa Giro dan Bunga Deposito		383.472.855	1.777.696.375
Lain-lain		8.433.727.999	1.933.613.650
Jumlah		<u>8.817.200.854</u>	<u>3.711.310.025</u>
Beban Diluar Usaha	3,28		
Beban Administrasi dan lain-lain		(68.016.671)	(158.056.889)
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		<u>9.749.184.183</u>	<u>3.553.253.136</u>
V L/R Sebelum Penugasan Pemerintah		<u>32.865.600.247</u>	<u>13.920.234.485</u>
VI PENDAPATAN (BEBAN) PENUGASAN PEMERINTAH	3,29		
Pendapatan Penugasan Pemerintah			
Kompensasi Gaji PNS dari Satminkal		9.882.376.582	9.974.083.889
Beban Penugasan Pemerintah			
Beban Pegawai Irigasi		(17.417.004.745)	(14.374.039.919)
Beban P&P Irigasi		(4.195.380.450)	(5.188.920.384)
Beban Umum dan Administrasi		(3.275.162.949)	(831.418.776)
Jumlah Pendapatan (Beban) Penugasan Pemerintah		<u>(15.005.171.562)</u>	<u>(10.420.295.190)</u>
VII Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak / EBIT		<u>17.860.428.685</u>	<u>3.499.939.295</u>
VIII PPh Badan Perkiraan	3,30	<u>4.362.807.200</u>	<u>488.602.400</u>
X Laba (Rugi) setelah PPh Badan		<u>13.497.621.485</u>	<u>3.011.336.895</u>
X Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	3,31	494.440.077	(237.694.488)
XI Laba (Rugi) setelah Pajak Tangguhan		<u>13.992.061.562</u>	<u>2.773.642.407</u>
II Koreksi L/R Karena Penetapan Pajak			624.409.788
III Laba (Rugi) Setelah Koreksi Pajak		<u>13.992.061.562</u>	<u>2.149.232.619</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: KEP-100/MBU/2002

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka, perlu dilandasi dengan sarana sistem penilaian kesehatan BUMN yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 199/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep.215/M-BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- c. Bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 199/KMK.016/1998.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3926);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang pengalihan kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada Lampiran I.
- (3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
 - a. **SEHAT**, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila 80 < TS <= 95
 - A apabila 65 < TS <= 80

- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:
- a. Aspek Keuangan
 - b. Aspek Operasional
 - c. Aspek Administrasi
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri BUMN untuk Perum.

BAB III

BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur dengan yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.
- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi:
 - a. Pembangunan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - d. Bendungan dan irigasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi BUMN yang bergerak dibidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV

BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M-BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara,
- Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Juni 2002
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Ttd.
LAKSAMANA SUKARDI

LAMPIRAN I :

SALINAN
TABEL KELOMPOK BUMN
INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR

BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN-NON INFRASTRUKTUR
SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
	Bidang Industri Pupuk dan Semen
	1 PT Pupuk Sriwidjaja
	2 PT Asean Aceh Fertilizer
	3 PT Semen Baturaja
	4 PT Semen Kupang
	Bidang Niaga
	5 PT Dharma Niaga
	6 PT Pantja Niaga
	7 PT Cipta Niaga
	8 PT Sarinah
	Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
	1 PT Bandha Graha Reksa
	2 PT Berdikari
	3 PT Indo Farma
	4 PT Kimia Farma
	5 PT Bio Farma
	6 PT Rajawali Nusantara Indonesia
	7 PT Garam
	8 PT Industri Gelas
	9 PT Industri Soda Indonesia
	10 PT Sandang Nusantara
	11 PT Cambrics Prinisima
	12 Bidang Pertambangan dan Energi
	13 PT Sarana Karya
	14 PT Batubara Bukit Asam
	15 PT Konservasi Energi Abadi
	16 PT Batan Tehnologi
	17 PT Perusahaan Gas Negara
	Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
	1 PT Kertas Leles
	2 PT Kertas Kraft Aceh
	3 PT Pradnya Paramita
	4 PT Balai Pustaka

BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
	Bidang Industri Strategis
	1 PT Dirgantara Indonesia
	2 PT DAHANA
	3 PT Barata Indonesia
	4 PT Boma Bima Indra
	5 PT Krakatau Steel
	6 PT Industri Kereta Api
	7 PT Industri Telekomunikasi Indonesia
	8 PT Len Industri
SEKTOR KAWASAN INDUSTRI, JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
	Bidang Kawasan Industri
	1 PT Kawasan Berikat Nusantara
	2 PT Kawasan Industri Makasar
	3 PT Kawasan Industri Medan
	4 PT Kawasan Industri Wijaya
	5 PT BDI Batam
	Bidang Konstruksi Bangunan
	1 PT Nindya Karya
	2 PT Wijaya Karya
	3 PT Waskita Karya
	4 PT Adhi Karya
	5 PT Brantas Abipraya
	6 PT Hutama Karya
	7 PT Istaka Karya
	8 PT Pembangunan Perumahan
	Bidang Konsultan Konstruksi
	1 PT Bina Karya
	2 PT Indah Karya
	3 PT Indra Karya
	4 PT Virama Karya
	5 PT Yodya Karya
	Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
	1 PT Amarta Karya
	2 PT Dok Perkapalan Kadja Bahari
	3 PT Dok dan Perkapalan Surabaya
	4 PT Industri Kapal Indonesia
	5 PT Jasa Marga
III. SEKTOR PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
1. PT Pelabuhan Indonesia I	
2. PT Pelabuhan Indonesia II	
3. PT Pelabuhan Indonesia III	
4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
5. PT Rukindo	
6. PT Varuna Tirta Prakarya	
Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
1. PT Angkasa Pura I	
2. PT Angkasa Pura II	

BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
Bidang Prasarana Perhubungan	
1. PT Pelayanan Djakarta Lloyd	1 PT Pelayaran Nasional Indonesia
2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	2 PT Garuda Indonesia
3. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	3 PT Merpati Airlines
4. PT Kereta Api Indonesia	Bidang Pos
	1 PT Pos Indonesia
	Bidang Pariwisata
	1 PT Hotel Indonesia dan Natour
	2 PT Pengembangan Pariwisata Bali
	3 PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
	Bidang Penyiaran
	1 PT Televisi Republik Indonesia
V. SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERDAGANGAN	
	Bidang Perkebunan
	1 PT Perkebunan Nusantara I
	2 PT Perkebunan Nusantara II
	3 PT Perkebunan Nusantara III
	4 PT Perkebunan Nusantara IV
	5 PT Perkebunan Nusantara V
	6 PT Perkebunan Nusantara VI
	7 PT Perkebunan Nusantara VII
	8 PT Perkebunan Nusantara VIII
	9 PT Perkebunan Nusantara IX
	10 PT Perkebunan Nusantara X
	11 PT Perkebunan Nusantara XI
	12 PT Perkebunan Nusantara XII
	13 PT Perkebunan Nusantara XIII
	14 PT Perkebunan Nusantara XIV
	Bidang Perikanan
	1 PT Usaha Mina
	2 PT Perikanan Samodra Besar
	3 PT Tirta Raya Mina
	4 PT Perikani
	Bidang Pertanian
	1 PT Pertani
	2 PT Sang Hyang Seri
	Bidang Kehutanan
	1 PT Inhutani I
	2 PT Inhutani II
	3 PT Inhutani III
	4 PT Inhutani IV
	5 PT Perhutani
V. SEKTOR PELAYANAN UMUM	
1. Perum Perumnas	
2. Perum Jasa Tirta I	
3. Perum Jasa Tirta II	
4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
5. Perum PPD	
6. Perum Damri	

BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
	1 Perum Perotakan Negara RI
	2 Perum Sarana Pengembangan Usaha
	3 Perum Peruri
	4 Perum Pegadaian
	5 Perum PPN

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ttd

LAKSAMANA SUKARDI

LAMPIRAN II :

SALINAN
TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUMN NON JASA KEUANGAN

ASPEK KEUANGAN

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (infra) 50
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (non infra) 70

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.

Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection Periods	4	5
6. Perputaran Persediaan	4	5
7. Perputaran Total Asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total Aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penelitian

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham/Return On Equity (ROE)

$$\text{Rumus ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba Setelah Pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari : aktiva tetap, aktiva non produktif aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.
- Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurang dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2 : Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	SKOR	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,5 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
ROE ≤ 1	1,5	2
ROE ≤ 0	1	0

Contoh Perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10%, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

$$\text{Rumus ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari : aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi dan depleksi.
- *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 3 : Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	SKOR	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
2 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI ≤ 0	0	1

Contoh Perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14%, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah sebesar 8.

c. Rasio Kas/Cash Ratio

$$\text{Rumus CashRatio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Panjang}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- *Current Liabilities* adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar Skor Penilaian Cash ratio

Cash Ratio = X (%)	SKOR	
	Infra	Non Infra
X >= 35	3	5
25 <= X <= 35	2.5	4
15 <= X <= 25	2	3
10 <= X <= 15	1.5	2
5 <= X <= 10	1	1
0 <= X <= 5	0	0

Contoh Perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5.

d. Rasio Lancar/Current Ratio

$$\text{Rumus Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar Skor penilaian current Ratio

Current Ratio = X (%)	SKOR	
	Infra	Non Infra
125 <= X	3	5
110 <= X < 125	2.5	4
100 <= X < 110	2	3
95 <= X < 100	1.5	2
90 <= X < 95	1	1
X < 90	0	0

Contoh Perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115%, maka sesuai tabel 5 skor untuk indikator current ratio adalah 4.

e. Collection Periods (CP)

$$\text{Rumus CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah total pendapatan usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar Skor Penilaian collection Periods

CP = X (hari)	Perbakan = X (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
X <= 60	X >= 35	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3.5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2.5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1.6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1.2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0.8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0.4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang ter baik dari kedua skor menurut tabel 6 di atas.

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki collection periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection Periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4.

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki collection periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 1,2
- Perbaikan Collection Periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5.

f. Perputaran Persediaan (PP)

$$\text{Rumus } PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi:

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
X ≤ 60	35 < X	4	5
60 < X ≤ 90	30 < X ≤ 35	3,5	4,5
90 < X ≤ 120	25 < X ≤ 30	3	4
120 < X ≤ 150	20 < X ≤ 25	2,5	3,5
150 < X ≤ 180	15 < X ≤ 20	2	3
180 < X ≤ 210	10 < X ≤ 15	1,5	2,4
210 < X ≤ 240	6 < X ≤ 10	1,2	1,8
240 < X ≤ 270	3 < X ≤ 6	0,8	1,2
270 < X ≤ 300	1 < X ≤ 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X ≤ 1	0	0

Contoh Perhitungan:

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki perputaran persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra Struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

$$\text{Rumus TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi:

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.

- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
$120 < X$	$20 < X$	4	5
$105 < X \leq 120$	$15 < X \leq 20$	3,5	4,5
$90 < X \leq 105$	$10 < X \leq 15$	3	4
$75 < X \leq 90$	$5 < X \leq 10$	2,5	3,5
$60 < X \leq 75$	$0 < X \leq 5$	2	3
$40 < X \leq 60$	$X \leq 0$	1,5	2,5
$20 < X \leq 40$	$X \leq 0$	1	2
$X \leq 20$	$X \leq 0$	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki perputaran total asset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108% dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

- h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS thd TA)

$$\text{Rumus TMS thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku di luar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = X	SKOR	
	Infra	Non Infra
$X \leq 0$	0	0
$0 < X \leq 10$	2	4
$10 < X \leq 20$	3	6
$20 < X \leq 30$	4	7,25
$30 < X \leq 40$	6	10
$40 < X \leq 50$	5,5	9
$50 < X \leq 60$	5	8,5
$60 < X \leq 70$	4,5	8
$70 < X \leq 80$	4,25	7,5
$80 < X \leq 90$	4	7
$90 < X \leq 100$	3,5	6,5

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35%, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

- BUMN INFRASTRUKTUR	35
- BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional"

3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai lingkaran/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali: Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik: Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup: Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang: Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Penetapan aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan an besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberi justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (Infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb
3. Research & Development	10	B	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb
	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non Infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 Daftar indikator dan bobot aspek administrasi

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
Total	15	15

3. Metode penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- Penentuan nilai

Tabel 11 Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka waktu laporan audit diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan diterima	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan diterima	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan diterima	0

- Contoh perhitungan

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dengan 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1996, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1996, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan nilai

Tabel 12 Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan nilai

Tabel 13 Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
Lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut.

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x + 1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan : Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	3
Total	6	6

- Metode penilaian masing-masing indikator

d.1. Efektivitas penyaluran dana

$$\text{Rumus } \frac{\text{jumlah dana yang disalurkan}}{\text{jumlah dana tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana yang tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:

- Saldo awal
- pengembalian pinjaman
- setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk akrual dari dana PIUKK RI/BN lainnya, jika ada)
- pendapatan bunga dari PUKK

- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana pinjaman (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp 10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun Rp 500
- Pengembalian pinjaman Rp 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp 4.000
- Pendapatan bunga dari PUKK Rp 500
- Jumlah Rp 10.000

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp 9.500 terdiri dari:

- Pinjaman Rp 8.500
- Hibah Rp 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat Kolektibilitas penyaluran pinjaman

Rumus $\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

Definisi:

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- Lancar 100 %
- Kurang Lancar 75 %
- Ragu-ragu 25 %
- Macet 0 %

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp 3.000 juta, terdiri dari (Rp Juta)

- Lancar 1.500
- Kurang Lancar 500
- Ragu-ragu 900
- Macet 100
- Jumlah 3.000

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar $1.500 \times 100\% = 1.500$
- Kurang Lancar $500 \times 75\% = 375$
- Ragu-ragu $900 \times 25\% = 225$
- Macet $100 \times 0\% = 0$

Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3.000} \times 100\% = 70\%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60%, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60% dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan. ✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service) ✓ Perbaikan mutu produk ✓ Pengembangan jalur distribusi. 	Pelabuhan Pengairan (PERUM	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb Pemenuhan supply air kpd PDAM/industri pengendalian banjir,

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelayanan gangguan/troubles. ✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan. ✓ Kecepatan pelayanan ✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan. ✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa. 	<p>Otorita Jatiuhur & PERUM Jasa Tirta) PLN</p> <p>Jalan Tol</p> <p>Garuda/MNA Bandara</p>	<p>pengendalian daerah serapan sungai, Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.</p> <p>Kualitas jalan, indikator traffic sign.</p> <p>On time performance.</p> <p>Kebersihan terminal bandara.</p>
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle. ✓ Peningkatan rendemen. ✓ Peningkatan produktivitas persatuan faktor produksi ✓ Pengurangan susut/losses baik susut teknis, distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. ✓ Peningkatan nilai men-hour. ✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi). 	<p>Perkebunan</p> <p>Kereta Api/pelayaran/penerbangan</p> <p>PLN</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiuhur & PERUM Jasa Tirta)</p> <p>Konsultansi</p> <p>Pertambangan</p>	<p>Rendemen, produksi per hektar, dsb.</p> <p>Load factor penumpang dan barang, penumpang kui-ton, dsb.</p> <p>Susut teknis, susut distribusi, dsb.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P).</p> <p>Men-hour terjual, dsb</p> <p>Jam jalan kapal keruk, eskavator, dsb.</p>
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana & prasarana produksi sesuai persyaratan standar. ✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang. ✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum. ✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan. ✓ Replacement sarana & prasarana yang sudah tidak produktif. 	<p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyediaan kasat, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alurkolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. ✓ Penciptaan produk-produk baru ✓ Peningkatan penguasaan teknologi. 	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mutu diklat ✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan Luar negeri). 	<p>Berlaku umum untuk semua sektor.</p>	<p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Kaderisasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan,</p> <p>Kepedulian manajemen terhadap R&D.</p>
6. Research & Development (R&D)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan metode baru yang prospektif. ✓ Hasil riset yang bermanfaat. ✓ Perhatian perusahaan terhadap R&D. 	<p>Berlaku umum untuk semua sektor.</p>	<p>Kepedulian manajemen terhadap R&D.</p>
7. Hasil pelaksanaan penugasan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pencapaian sasaran. ✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran. ✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan. 	<p>Berlaku umum untuk semua sektor.</p>	<p>Pencapaian sarana, efisiensi dalam pencapaian sasaran.</p>
8. Kepedulian terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebersihan lingkungan. ✓ Pelaksanaan AMDAL ✓ Reklamasi ✓ Estate regulation. 	<p>Berlaku umum untuk semua sektor</p> <p>Kehutanan</p> <p>Pertambangan</p> <p>Industri manufaktur</p> <p>Kawasan Industri.</p>	<p>Kebersihan lingkungan kerja</p> <p>Reboisasi, AMDAL</p> <p>Reklamasi daerah eks tambang</p> <p>AMDAL</p> <p>Estate regulation, AMDAL.</p>

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ttd
LAKSAMANA SUKARDI